

Analisis Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2019

I Wayan Wiasthana Ika Putra
Bappeda Litbang Provinsi Bali
Email: wiasthana_ika@yahoo.com

ABSTRACT

The Bali Province Regional Competitiveness Analysis Report 2019 presents information from various fields of development activity. This report is expected to be used as an analysis of indicators of development success that has been achieved. In addition, this report can also be used to find out the increase of development sectors and forecast future information needs. Of course this information is expected to support an increase in the implementation of development in the Bali Region.

Keywords: analysis, regional competitiveness, development results, Bali Province.

PENDAHULUAN

Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08003'40"-08050'48" Lintang Selatan dan 114025'53"-115042'40" Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi delapan kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat/desa pakraman, 1.596 subak sawah, dan 1.130 subak abian dengan total 2.726 subak/subak swah pada tahun 2018. Ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi daerah dan akan lebih efektif bila memanfaatkan dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yang menerapkan siklus mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan terakhir melalui tahapan evaluasi yang dilakukan secara utuh dan kontinyu sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan hasil yang didapat setelah melakukan evaluasi merupakan umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepannya. Mengingat pentingnya arti evaluasi, berdasarkan amanat Permendagri maka pada bab ini akan dilakukan pencermatan kondisi daerah dan implementasi program yang telah dilaksanakan sesuai kondisi daerah yang ada.

Provinsi Bali merupakan bagian dari 34 Provinsi di Indonesia dan merupakan sebuah ekosistem pulau kecil. Bali merupakan destinasi wisata terkemuka Indonesia. dan beberapa kali dinobatkan sebagai Pulau Terindah di Dunia. Pariwisata budaya merupakan potensi utama Bali yang telah memberikan kemajuan di berbagai bidang kehidupan sehingga Bali tumbuh menjadi kawasan tujuan investasi pariwisata nasional

dan internasional. Dampak negatif pariwisata cenderung telah mendegradasi lingkungan alam dan budaya Bali itu sendiri sehingga dikhawatirkan daya tarik Bali menjadi berkurang dan mengancam keajegan Bali itu sendiri.

Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali telah menetapkan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan atau Kawasan Metropolitan Sarbagita (KMS) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi. Dengan demikian, dibutuhkan RTRW Provinsi Bali sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang penekanan hanya memuat rencana yang bersifat provinsi lintas wilayah kabupaten/kota dan interdependen yang selanjutnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009. Deliniasi Provinsi Bali adalah 563.666 Ha merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia terdiri atas seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar.

Sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah adalah pariwisata, industri kreatif, dan pertanian dalam arti luas.

1. Pariwisata;

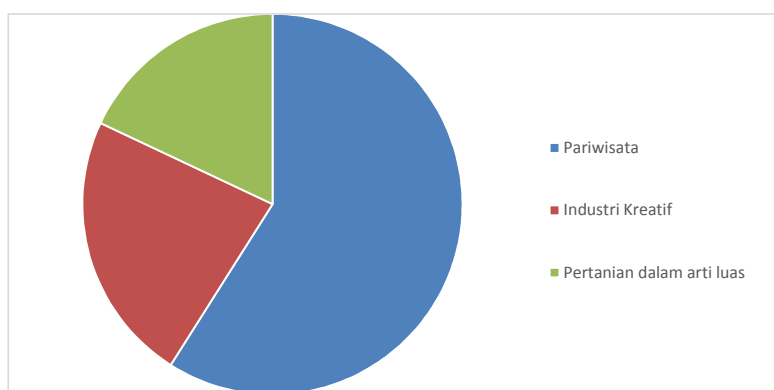
Bali memiliki alam, budaya serta tradisi yang menarik sebagai modal dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Bali.

2. Industri Kreatif

Bali memiliki cukup banyak usaha ekonomi kreatif baik skala besar, menengah, kecil dan mikro.

3. Pertanian dalam Arti Luas

Meskipun lahan pertanian tidak terlalu, tetapi sektor pertanian bali memiliki komoditas unggulan yang cukup beragam seperti buah-buahan lokal yang memiliki kalitas yang baik. Di samping itu sektor pertanian ini bisa disinkronisasikan dengan sektor pariwisata seperti menjadi Agro Wisata.



Gambar 1. Sektor-sektor Unggulan Provinsi Bali

ARAH KEBIJAKAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, dll)

Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendistribusikan pendapatan yang lebih merata antar golongan dan wilayah, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah serta *me-manage* terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Provinsi Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Daya dukung kebudayaan dan kesenian serta panorama dan keindahan alam, sehingga menjadikan Bali sebagai daerah yang memiliki ciri khas tersendiri.

Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali potensi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* dengan tidak melupakan konsep *Tri Hita Karana* sebagai perwujudan dari hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam. Terkait dengan itu, beragam potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Bali merupakan aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan dalam pencapaian pembangunan.

Keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2019 tetap diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota).

Di samping itu juga diupayakan peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi daerah serta peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merealisasikan capaian pembangunan tersebut, sangat ditentukan oleh perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, agar menjamin pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini akan cenderung dapat memaksimalkan alokasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial sebagai dasar



kebijakan anggaran yang efektif dan efisien melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Extraordinary Strategy* melalui *Research-based Planning (RBP)* dan *Planning-based Development (PBD)

Berdasarkan dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terdapat permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya, di mana terdapat empat isu strategis dalam perencanaan pembangunan, empat isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan sustainability/keberlangsungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan adalah kesenjangan antarwilayah, antarsektor (pariwisata & pertanian), produktivitas budaya, destinasi dan atraksi wisata, sumber daya manusia, ketahanan budaya, daya dukung lingkungan, reformasi birokrasi.

Kerangka Kebijakan Terintegrasi Penelitian

Dari pengukuran IDSD perlu kiranya meningkatkan daya saing daerah berdasarkan aspek sumber daya manusia dan aspek inovasi, dan memperbaiki kelemahan daya saing dari aspek keuangan daerah, stabilitas ekonomi dan ketrampilan tenaga kerja. Kebijakan dan pengembangan yang direkomendasikan adalah Optimalisasi Tenaga Kerja, Pengembangan Iklim Inovasi, Penguatan Kualitas SDM, dan Penguatan Iklim Bisnis dan Pemerataan Kesejahteraan.

SOLUSI MENYELURUH

Agenda Kerjasama dan Kolaborasi

Fokus utama pembangunan Bali mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional.

Resolusi Tahunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, selain memperhatikan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju; Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

Konektivitas Antarlembagaan dan Kewenangan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Bali menuangkan strategi dan arah kebijakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi agenda program/kegiatan selama 5 (lima) tahunan, dan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, masyarakat, serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Bali.

TATA KELOLA DAN DUKUNGAN

Agenda Kerja Tim Daya Saing Daerah melalui *Innovation Hub (I-hub)*;

Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah dan mencapai sasaran penguatan SIDA Provinsi Bali dengan empat indikator outcome yang ingin dicapai, program-program prioritas dan rencana aksi penguatan SIDA Provinsi Bali dikelompokkan ke dalam empat kelompok sesuai dengan empat sasaran penguatan SIDA, antara lain :

1. Pertumbuhan kewirausahaan karena implementasi SIDA menyebabkan peningkatan IKM sebesar 2-4%.
2. Pertumbuhan nilai tambah produk industri akibat diterapkannya SIDA dalam bentuk peningkatan nilai produksi IKM sebesar 2-4%.
3. Peningkatan lapangan kerja akibat implementasi SIDA akan menurunkan angka pengangguran terbuka sebesar lebih dari 6%.
4. Pertumbuhan ekonomi lokal ditargetkan menyebabkan peningkatan PDRB di atas 6% (AHDK).

Anggaran, *Human Capital*, dan Inovasi

Secara umum optimalisasi anggaran masih lemah dan rendahnya pembiayaan penelitian di bidang inovasi dan pembiayaan dari pemerintah daerah masih belum banyak menghasilkan inovasi bagi daerah. Pemerintah daerah terus berupaya dalam mencari sumber pembiayaan alternatif dan diharapkan ada keterlibatan swasta dalam dukungan dari segi pembiayaan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.

Dalam hal ini diharapkan juga peran dari perguruan tinggi dituntut lebih kreatif terutama dalam membangun kerjasama dan kemitraan dengan dunia industri – dunia usaha untuk menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif melalui mobilisasi sektor swasta.

LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran (dalam bentuk link alamat website, database, situs, dll).

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Profil Daerah Tahun 2018.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (<https://sipd.kemendagri.go.id/>).

